

# STRATEGI POLITIK NAHDLATUL ULAMA DI ERA ORDE BARU

Nurul Shobacha

IAIN Sunan Ampel Surabaya

*nshobacha@gmail.com*

## Abstract

This article aims to elaborate the political's strategy of Nahdlatul Ulama (NU) in the New Order. NU has a long history at political history in Indonesia. The findings showed that relation between NU and the state always up and downs. In the Old Order, NU became a large Islamic organization in Indonesia, in addition became a political party. In this era, because of simplification of political parties, NU joined to Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Unfortunately, NU was being weak because PPP had been dominated with Islamic modern groups. NU back to Khittah 1926 and back to the beginning of agreement in the Old Order era. NU decided for focusing in education field.

**Keywords:** Nahdlatul Ulama, political strategy, political party, *khittah*

## Abstrak

Artikel ini mengelaborasi strategi politik Nahdlatul Ulama (NU) pada masa Orde Baru. NU memiliki sejarah panjang dalam sejarah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Relasi NU dengan negara mengalami pasang surut. NU menjadi organisasi Islam besar di Indonesia di era Orde Lama dan setelah itu, menjadi organisasi politik pada waktu itu. Di era Orde Baru, karena adanya penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia, NU masuk ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, NU menjadi lemah karena PPP banyak didominasi oleh kelompok Islam modern. Jadi, mereka kembali ke khittah 1926 dan kembali ke awal perjanjian di masa Orde Lama. NU memutuskan untuk kembali fokus di bidang pendidikan.

**Kata kunci:** Nahdlatul Ulama, Strategi Politik, partai politik, *khittah*

## Pendahuluan

Salah satu organisasi terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Organisasi ini memiliki tradisi intelektual moderat, apresiatif dengan khazanah pemikiran masa lalu (*legacy of the past*) maupun budaya lokal, dan memiliki kemampuan menyerap tradisi pemikiran baru yang datang dari manapun melintasi batas negara, agama dan ideologi (Zahro, 2004: v). NU ikut bertanggung jawab memberikan kontribusinya dengan membangun cita-cita keadaban bangsa. Hal itu tidak lain karena kontribusi NU tidak hanya dialamatkan kepada jamaah NU, tetapi lebih besar dari itu bagaimana NU bisa berkontribusi kepada bangsa (Zada dan Sjadzili, 2010: ix). NU tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pesantren, mengingat sebagian besar pendiri dan pendukung utamanya adalah para kiai yang berasal dari dan memimpin pesantren (Effendi, 2010: 1).

NU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusinya dalam membangun cita-cita keadaban bangsa. NU adalah jendela pemikiran Indonesia. Ia bisa dikatakan menjadi pembuka bagi bersemainya pandangan tentang negara nasional (*national state*) ketika organisasi-organisasi Islam masih menghendaki Islam sebagai dasar negara (Zahro, 2004: vi). NU di dirikan pada 1926 oleh para kiai pesantren dan dipimpin secara nasional pada waktu itu oleh Kiai Hasyim Asy'ari dari Jombang. Sejak itu kepemimpinan nasional dipegang oleh kiai dari Jombang selama beberapa waktu. NU adalah organisasi sosial keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara ortodoksi Islam yang dipegang oleh kebanyakan ulama Indonesia, yakni ortodoksi *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan umat Islam yang mengikuti ortodoksi ini biasa disebut dengan kaum Sunni. Amalan keagamaan NU lebih merujuk kepada Imam Syafi'i daripada imam yang lainnya (Turmudi, 2004: 40-41).

Perjuangan khas NU lebih pada mempertahankan budaya yang baik-baik dan mengaplikasikan agama juga dengan baik dan benar. Sesuai dengan motto NU: Memelihara apa yang datang dari masa lampau asalkan baik, dan mengambil yang lebih baik dari apa yang terjadi (*Al-Muhafadzatu 'ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdu bi al-Jadid al-Ashlah*) (Bisri, 2002:

119). Sejalan dengan tradisi politik Islam Sunni, NU dalam perjalanan sejarahnya biasanya bersikap akomodatif terhadap pemerintah, dan para pemimpinnya seringkali dituduh sebagai orang-orang yang sangat oportunistis. Namun ketika kebijakan-kebijakan khas Orde Baru secara bertahap berjalan menurut arahnya sendiri, NU menjelma sebagai pengkritik yang terus terang dan konsisten terhadap berbagai kebijakan (Wajidi, 1994: 3). Kini NU dan politik mungkin dapat dianggap sebagai dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain.

Tulisan ini akan memfokuskan diri pada strategi politik NU pada masa orde baru, yang diawali dengan sejarah panjang NU sejak orde lama dilanjutkan dengan perjalanan NU di masa orde baru yang sangat dinamis. Pada bagian awal, akan ditelesuri terlebih dulu latar belakang kelahiran dan peran Nahdlatul Ulama. Bagian berikutnya akan membahas perkembangan Nahdlatul Ulama saat sesudah memasuki orde baru beserta perannya.

### **Komunikasi Politik**

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (Surbakti, 1992: 119). Dalam buku Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media dijelaskan,

*“Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict.”* (Nimmo, 2000: 13)

1. Menurut Littlejohn, dalam komunikasi terdapat level atau tingkatan komunikasi yakni komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Komunikasi antar personal adalah komunikasi yang melibatkan antar sesama orang/individu dan biasanya *face to face*. Komunikasi kelompok adalah komunikasi atau hubungan antara individu di dalam kelompok kecil, dan biasanya dilakukan dalam merencanakan pengambilan keputusan. Komunikasi organisasi lebih kompleks lagi, karena hubungannya tidak hanya melibatkan antar individu akan

tetapi juga antara individu dengan kelompok-kelompok. Sedangkan komunikasi massa adalah komunikasi yang melibatkan ranah publik, dan memuat banyak hubungan, yakni hubungan antar personal, kelompok, dan organisasi (Littlejohn, 1998: 17).

2. *Source-message-channel-receiver theory*. S-M-C-R merupakan singkatan dari *Source* (sumber) - *Message* (pesan) - *Channel* (saluran/media) - *Receiver* (penerima/komunikator). Pada rumus S - M - C - R, khusus mengenai C (*channel*) yang berarti saluran atau media, menurut Sappir mengandung dua pengertian, yakni *primer* dan *sekunder*. *Saluran primer* adalah media yang merupakan lambang, misalnya bahasa, gambar atau warna yang digunakan dalam komunikasi tatap muka (*face to face communication*), sedangkan *saluran primer* adalah media berwujud, baik media massa misalnya surat kabar, televisi atau radio, maupun media non masa, misalnya surat, telepon atau poster (Efendi, 1993: 256). Kemudian komunikasi politik di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia biasanya menggunakan dua sistem komunikasi dominan, yaitu media massa modern dan sistem komunikasi tradisional (Schramm, 1964: 82). Untuk mempengaruhi masyarakat, maka sangat perlu untuk memilih sarana komunikasi yang tepat, sesuai dengan keperluan dan kepada siapa pesan politik ingin disampaikan. Untuk masyarakat perkotaan kelas menengah, komunikasi politik melalui media massa sangat efektif karena pola hidup mereka yang sibuk tidak memberi mereka peluang untuk melakukan komunikasi langsung dengan orang lain. Apalagi kalau mereka tidak punya kepentingan langsung dengan sang komunikator. Bagi mereka, media massa cetak dan elektronik merupakan sarana paling efektif untuk mengetahui dan menyampaikan umpan balik setiap pesan politik yang ada. Sementara untuk masyarakat pedesaan, apalagi masyarakat pedalaman yang secara literal tidak memiliki tradisi baca, pesan politik hanya bisa disampaikan oleh sistem komunikasi tradisional. Dalam konteks ini, seperti diungkap oleh Astrid Susanto (1978: 57), komunikasi yang paling efektif adalah dengan menggunakan sistem komunikasi lokal yang sesuai dengan budaya mereka.

Pendekatan-pendekatan interpersonal dengan tokoh-tokoh lokal yang menjadi pengatur lalu lintas opini menjadi kunci keberhasilan dalam sistem komunikasi tradisional ini (Ali, 2007: 48). Menurut para pakar, model komunikasi Lasswell merupakan salah satu model yang paling awal dalam perkembangan teori komunikasi. Lasswell menyatakan bahwa: Cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan: *Who Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect* (Siapa Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, kepada siapa, dengan efek apa). Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah berupa unsur-unsur proses komunikasi, yaitu *Communication* (komunikasi), *Message* (pesan), *Media* (media), *Receiver* (komunikasikan/penerima), dan *Effect* (efek). Lebih lanjut Lasswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi meliputi.

- a. *The surveillance of the environment* (pengamatan lingkungan). Fungsi ini merupakan kegiatan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai peristiwa dalam suatu lingkungan, seperti penggarapan dan penyampaian berita.
- b. *The correlation of the parts of society in responding to the environment* (korelasi kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika menanggapi lingkungan). Fungsi ini merupakan kegiatan interpretasi terhadap informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan, seperti propaganda-propaganda atau tajuk rencana.
- c. *The transmission of the social heritage from one generation to the next* (transmisi warisan sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain). Fungsi ini merupakan kegiatan pengkomunikasian informasi, nilai, dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain atau dari anggota suatu kelompok kepada pendatang baru, seperti kegiatan pendidikan/pembelajaran (Efendi, 2010: 253).

## Strategi Politik

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian sebuah tujuan. Biasanya strategi diidentikkan dengan bidang militer yaitu strategi dalam peperangan. Dengan demikian, strategi tidak hanya digunakan dalam bidang militer, tetapi telah meluas ke berbagai aspek kehidupan. Jadi, strategi adalah cara melaksanakan sebuah politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang berasal dari akar kata *polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan *teia* yang berarti urusan. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. *Politics* dan *policy* mempunyai hubungan yang erat. *Politics* memberikan jalan, asas, arah dan medannya sedangkan *policy* memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan dan arah tersebut.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut membutuhkan kebijakan-kebijakan umum (*public policy*) yang menyangkut peraturan, pembagian atau pengalokasian sumber-sumber yang ada. Jadi, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan urusan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan dan distribusi atau alokasi sumber daya. Politik juga dapat diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan.

Strategi politik adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam kata lain, strategi politik juga bisa diartikan sebagai seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan (Hidayat, 2001: 1).

Untuk landasan teori ini penulis memakai strategi pergerakan dan perjuangan umat Islam umumnya dan khususnya warga

negara Nahdlatul Ulama di Indonesia. Menurut Kuntowijoyo ada tiga strategi pergerakan dan perjuangan umat Islam yaitu: strategi struktural, kultural dan mobilitas sosial. Strategi struktural yang juga disebut sebagai strategi politik menggunakan sarana politik. Dengan tiga strategi yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo tersebut, penulis berusaha menggunakan dalam melihat NU pada masa reformasi dalam perjuangan menegakkan demokrasi. Organisasi sosial keagamaan seperti halnya Muhammadiyah, NU yang dikaji dalam penelitian ini, sejak awal memang menggunakan strategi kultural. Hanya saja dalam perkembangannya, karena tuntutan zaman, mereka mengadopsi strategi struktural dan mobilisasi sosial serta mengabaikan strategi awalnya. Namun sebenarnya strategi awal tetap, cuma orientasinya yang berubah (Nafsiah, 2000: 80).

### **Latar Belakang Kelahiran Nahdlatul Ulama**

Islam telah menyebar luas di Indonesia sejak abad 13 hingga saat abad 19 Islam semakin menyebar di Indonesia. Saat itu pesantren mulai ada di tiap wilayah. Namun antara perilaku santri asli dengan santri *abangan* masih sulit dibedakan karena kepercayaan-kepercayaan mistik pra-Islam (kebatinan/kejawen) masih sulit dipisahkan, sebab hal tersebut merupakan budaya lama Indonesia yang dibawa oleh Hindu dan Buddha (Feillard, 1999: 4).

Saat abad 20 dunia santri semakin menyerap dunia *abangan*. Dari hal-hal tersebut, usaha reformasi Islam dimulai di abad ini dengan tujuan untuk melaksanakan ajaran Islam secara “lebih benar”. Tahun 1912 lahirlah organisasi keagamaan yang juga *concern* dengan pemikiran kaum Wahabi, yakni Muhammadiyah. Organisasi ini menganggap para kiai telah dipenuhi hal-hal yang bersifat *takhayul* dan *bid'ah*, yang menyebabkan terjadinya stagnasi pada umat Islam. Adapula Wahabi sendiri yang berkembang terutama di Sumatera yang menerapkan kekerasan yang kemudian disusul Salafi. Lambat laun muncul pula Al Irsyad dan Persatuan Islam (Persis) yang menolak tahlil, ziarah kubur, selamatan, sesaji, yang dianggap syirik dan *bid'ah* (Moesa, 2007: 105).

Saat itu para kiai dari Islam tradisional belum memiliki kekuatan yang penuh dalam menanggulangi merebaknya aliran Islam Reformis di Indonesia. Akhirnya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah mengorganisir Islam tradisional dan bekerjasama dengan tokoh Nasionalis, kemudian mendorong Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi untuk Ulama dan Islam tradisional. Awalnya Kiai Hasyim Asy'ari menolaknya, namun lambat laun beliau menerimanya. Lalu dibentuklah *Komite Hijaz* yang bertujuan untuk mewakili mereka dalam melindungi kelestarian mazhab-mazhab ortodoks serta kegiatan tarekat di Hijaz (sekarang Arab Saudi). Namun, pada tanggal 31 Januari 1926 Komite Hijaz berubah nama menjadi *Nahdlatul Ulama* (NU), organisasi yang mewakili Islam tradisional (Feillard, 1999: 12). Tujuan utama didirikannya NU pada tahun 1926 adalah untuk menciptakan hubungan antara ulama yang berpegang pada empat mazhab Sunni dan meneliti buku-buku teks agama untuk mengetahui apakah buku-buku tersebut mengandung pikiran-pikiran para reformis atau tidak. Tujuan lainnya adalah untuk melakukan amal, pendidikan, memajukan pertanian, dan perdagangan (Feillard, 1997: 4). NU didirikan sesungguhnya lebih merupakan usaha sederhana dalam pelembagaan tradisi keagamaan yang telah lama mengakar.

Keterlibatan NU dalam kancah politik praktis secara signifikan baru dimulai pada tahun 1939 ketika ia bergabung dalam *Majlisul Islam A'la Indonesia* (MIAI), namun pada tahun 1943 MIAI secara resmi dibubarkan dan kemudian diganti Masyumi. Pada saat itu untuk pertama kalinya NU memasuki urusan pemerintahan sebab NU ditempatkan sebagai subordinasi di dalamnya. Saat Jepang menyerah kepada sekutu dan akhirnya Indonesia ini merdeka, politik Indonesia diwarnai perdebatan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler. Para pemimpin NU senantiasa terlibat aktif dalam berbagai kesempatan. Terutama saat pendefinisian Pancasila. NU yang memiliki semboyan politik "kerjasama Islam Nasionalis, sebagai kekuatan inti persatuan, sangat berusaha untuk menyatukan rakyat Indonesia di antara perbedaan-perbedaan yang ada, namun tetap berpandangan bahwa Kepala Negara harus seorang Indonesia yang asli dan muslim (Feillard, 1999: 54).

Pada tahun 1950-an, NU masih menjadi anggota Masyumi. Posisi NU semakin kuat dalam pemerintahan namun semakin lemah di dalam Partai Masyumi sebab partai tersebut lebih didominasi oleh Islam Reformis. Setelah bimbang beberapa saat, NU akhirnya memisahkan diri dari Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri pada Muktamar di Palembang akhir April 1952 (Feillard, 1997: 44-45). Setelah keluar dari Masyumi, NU masuk dalam Kabinet Ali Sastroamdiyo yang dipimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) dan didukung Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Peran politik NU semakin meningkat dan kedekatan dengan Soekarno semakin meningkat (Muhtadi, 2004: 105).

Di masa Orde Lama, NU sangat mendukung kepemimpinan Soekarno, Soekarno dianggap memberi angin segar kepada PKI, namun hal tersebut tidak mempengaruhi sikapnya yang keras menentang komunisme. Dengan adanya gagasan Nasakom, seolah gagasan tersebut melindungi PKI yang digunakan Soekarno untuk mengimbangi Angkatan Bersenjata yang semakin memantapkan kedudukannya untuk menghadapi PKI. Kerjasama NU semakin kuat juga dengan ABRI karena menghadapi musuh yang sama yakni PKI. NU di sini seolah terpecah menjadi dua aliran, yang pertama yakni golongan yang berpihak pada Soekarno, dan yang kedua adalah golongan berpihak pada ABRI.

### **Nahdlatul Ulama di Masa Orde Baru**

Pada tahun 1966, Achmad Sjaichu mengatakan bahwa ABRI bagaikan saudara yang lahir dari satu ibu. Namun ABRI menetapkan sebuah sistem baru dan menarik dukungannya kepada Soekarno. Baru kemudian, setelah jelas tidak akan mengizinkan pembubaran PKI, Soekarno secara bertahap disingkirkan. Di awal tahun 1966, aksi-aksi pembantaian mulai mereda, setelah sebelumnya terjadi pemberantasan terhadap PKI dengan cukup keras supaya PKI tidak tumbuh subur di Negara Indonesia. Pada saat itu, NU dengan mempersiapkan organisasi kepemudaan Ansor, Banser (1964) untuk menghadapi pertempuran yang diduga semakin gawat, dan saat tanggal 8 Oktober 1965, pemuda Muslim membakar markas besar PKI.

Kesetiaan NU terhadap Soekarno semakin besar dan terus berlanjut bahkan hingga sesudah pelimpahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto 11 Maret 1966. Setelah peralihan kekuasaan kepada Suharto tanggal 11 Maret 1966, sebagian perombakan pada MPR dan DPR, sebagian diserahkan kepada NU. Pada titik inilah NU memainkan peran kunci dalam peralihan kekuasaan secara bertahap karena dalam beberapa waktu saja, Jendral Suharto berhasil menumpas G30S. NU juga memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilalihan kekuasaan secara konstitusional oleh Jendral Suharto. Demikian pula, NU ikut andil dalam membungkunya karier politik Suharto melalui *reshuffle* yang dilakukan DPR-GR dan dua resolusi, yang mengabsahkan peralihan kekuasaan ke tangan Suharto. Resolusi yang dimaksud di sini adalah, pertama, resolusi Lubis, di mana Nurdin Lubis pernah mengajukan resolusi agar Sukarno dicopot dari jabatannya sebagai presiden, dan kedua resolusi yang disampaikan oleh Djamaluddin Malik, seorang anggota DPR-GR dari NU. Resolusi ini meminta agar MPRS mengangkat Jendral Suharto menjadi presiden RI.

Di Indonesia, pemilu sudah tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1955, hal tersebut menimbulkan banyak pertikaian. Menurut ABRI, karena ABRI belum punya partai untuk mendukungnya, maka mereka terus mengulur waktu supaya pemilu dilaksanakan lama. Namun bagi NU, mereka menginginkan pemilu cepat dilaksanakan karena mereka yakin sikapnya yang anti komunis akan membuatnya memenangkan pemungutan suara di tingkat nasional. Pada tahun 1966, Ansor meminta pemilu dilaksanakan paling lambat tahun 1967 namun MPRS memutuskan pemilu dilaksanakan pada Juli 1968.

Semenjak Orde Baru, Suharto mulai membuka bantuan dan penanaman modal dari asing seperti dari Amerika, Jepang, dan lain-lain. Bantuan dari luar negeri seolah tak berkurang, namun terus meningkat. Pada tahun 1967, bantuan dari asing mencapai 200 juta dolar dan pada tahun 1969 bantuan mencapai 500 juta rupiah. Bantuan tersebut melampaui dua milyar sejak tahun 1975. NU sangat mengkhawatirkan dampak bantuan asing tersebut serta mengkhawatirkan dampak budaya asing yang

kelak masuk di Indonesia. NU meminta kepada Soeharto supaya penanaman modal dan bantuan asing dibatasi.

Di sisi lain, dalam konteks kepartaian, Orde Baru yang dipimpin Soeharto menginginkan partai politik berjumlah sedikit saja. Sehingga terjadi penggabungan paksa partai politik menjadi dua partai, dan hal tersebut cukup mengejutkan bagi NU. Sehingga NU, Parmusi, PSII, dan Perti digabungkan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PNI, Pakindo, Partai Katholik, IPKI dan Murba digabungkan pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PPP sendiri mulai dibentuk pada tanggal 5 Januari 1973, dengan tujuan mempertahankan dan membangun negara Republik Indonesia di atas landasan Pancasila dan UUD 1945, menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah.

Di sinilah NU mulai diperlakukan tidak adil sejak Partai Islam dijadikan satu, sejak NU kehilangan Departemen Agama dan karena keikutsertaan NU dalam Orde Lama. Lambat laun, orang-orang tradisionalis menilai, tersisihnya NU itu dikarenakan kurangnya “kematangan Politik NU sendiri”. Hasyim Lathif pun mengatakan, dalam Orde Baru ini, ABRI lah satu-satunya kekuatan yang mempunyai konsep pemerintahan yang sudah siap. Menjelang tahun 1980-an, karakteristik yang mewarnai Indonesia adalah perdebatan ideologis dan perubahan yang mendalam di dalam tubuh lembaga-lembaga Islam. Salah satu pengaruh juga dikarenakan adanya ideologi Timur Tengah mulai bebas masuk ke Indonesia. Sejak pembentukan PPP, golongan Parmusi dan NU pun bermasalah. Jabatan politik juga berada di tangan ketua umum Mintaredja, seorang modernis dari muslim Indonesia.

Di tahun 1975, NU memutuskan untuk mengadakan konferensi besar dengan mengundang para ulama membahas situasi yang serba baru. Sebab saat itu para pemimpin NU tampak meninggalkan ormas NU dan partai PPP. Karena kekosongan itu, wilayah daerah mulai mengambil inisiatif. Para ulama memutuskan untuk “mempergiat usaha-usaha di bidang sosial” sambil menyesuaikan diri dengan identitas baru organisasi keagamaan “jam’iyah”. Pada tanggal 4 Februari 1976 dibentuklah lembaga pendidikan independen (Lembaga Ma’arif) di

Yogyakarta. Lembaga ini minta pada sekolah-sekolah NU agar masuk ke dalam yayasan.

Pada Mukhtamar ke 25 di Surabaya, Rais Am Kiai Wahab Hasbullah menghimbau para aktivis agar kembali ke khittah 1926. Ada beberapa faktor terkait mengarah pada penolakan keikutsertaan kehidupan politik. *Pertama*, ada tekanan yang diderita para pegawai negeri/para pengusaha yang tergantung pada administrasi untuk mendapatkan bagian tender pekerjaan umum. *Kedua*, ketidakpuasan terhadap pengabaian tugas-tugas utama yang bersifat sosial/pendidikan. Pengabaian jangka panjang dapat membuat NU kehilangan akarnya dalam masyarakat. Ketidakpuasan juga banyak muncul karena kepengurusan Idham Chalid yang suka merahasiakan hal yang mestinya diketahui oleh umum dan tidak memberikan dukungannya pada cabang-cabang daerah yang menderita tekanan dari pemerintah sehingga dalam beberapa kasus menyebabkan hancurnya (cabang tersebut) (Feillard, 1997: 210).

Pada Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo juga sangat menarik. Sebab, *pertama*, telah diambilnya keputusan kembali ke khittah 1926, yang berarti NU secara organisatoris tidak lagi berpolitik praktis. *Kedua*, pada mukhtamar ini, untuk pertama kalinya Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 1984-1989. Kehadiran Gus Dur dalam organisasi ini penting untuk dicatat, paling tidak karena ia telah memberikan warna tersendiri, terutama karena watak pribadi Gus Dur serta pendekatannya yang khas dalam membawa NU ke dalam wacana sosial politik di Indonesia. Para kiai pun mendukung prakarsa pemuda NU, karena pada dasarnya gagasan kembali ke khittah 1926 berarti pula mengembalikan posisi ulama pada peran yang lebih besar lagi. Sebab NU terlibat dalam pergumulan politik praktis, sejumlah ulama telah meninggalkan misi keumatannya karena “tergoda” rebutan kekuasaan (Muhtadi, 2001: 186-188).

## Penutup

Dari pembahasan tersebut, penulis menganalisis dengan teori yang pertama, yaitu teori komunikasi politik. Dalam judul Peran Politik NU Masa Orde Baru, di antara peran-peran mereka, pasti ada tingkat komunikasi yang tinggi dari kelompok NU ke

pemerintah lalu kemudian ke masyarakat. NU sangat mengutamakan komunikasi. Di masa pra kemerdekaan NU belum bersatu seperti saat ini. Mereka hanya kumpulan ulama-ulama yang belum menyatukan kekuatan. Hal tersebut masuk dalam level komunikasi antar personal. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau lingkup komunikasi mereka antar personal. Di Indonesia saat sedang gencar-gencarnya muncul aliran Islam Reformis, yakni aliran yang datang dari wilayah Timur Tengah. Sedangkan para ulama ingin mempertahankan Islam tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian oleh desakan Kiai Wahab Hasbullah dan diiringi semangat Kiai Hasyim Asy'ari, akhirnya muncullah organisasi Nahdlatul Ulama. Dengan munculnya organisasi ini, para kiai sudah mulai menyatukan kekuatan demi lestariannya Islam Tradisional. Komunikasi mereka bisa dibilang sangat berhasil. Sehingga tanpa ragu-ragu, mereka melangkah ke panggung politik. Teori kedua yang penulis pakai adalah teori Strategi Politik. Bila dikaitkan dengan judul "Peran Politik NU Masa Orde Baru" adalah di balik peran tersembunyi sebuah strategi. NU sangat pandai dalam hal penentuan strategi-strategi.

Strategi NU yang digunakan untuk menjaga keharmonisan tiap-tiap warga Negara Indonesia adalah dengan menyetujui penggunaan Pancasila sebagai dasar negara. Namun NU juga tetap tegas, meskipun NU sangat setuju dengan Pancasila, namun NU menentang pelebagaan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) oleh Pemerintah. Sebab NU khawatir P4 di masa mendatang dapat menggantikan agama dan menjadi dasar pedoman segala kegiatan. Contohnya, di dalam sila Pancasila menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian orang Islam mau menjalankan ibadah/shalat dikarenakan harus patuh dan taat pada Pancasila yang menjadi dasar. Hal tersebutlah yang ditakutkan NU. Padahal ibadah/shalat itu dikarenakan patuh dan taat kepada Allah, bukan karena pancasila.

Nahdlatul Ulama yang pada awalnya adalah perkumpulan para Ulama yang ingin menolak adanya reformis Islam yang berasal dari Timur Tengah dengan maksud tetap melestarikan budaya Indonesia dan tetap tunduk pada Islam. Sebab budaya

Timur Tengah jauh berbeda dengan budaya Indonesia, yang dapat mengakibatkan musnahnya budaya Indonesia yang kaya ini. Peran NU sangat penting dalam pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. NU turut serta dalam perumusan Pancasila, penumpasan PKI, memainkan peran kunci dalam peralihan kekuasaan secara bertahap, pengambil alihan kekuasaan secara konstitusional oleh Jenderal Suharto dan ikut andil dalam membubungnya karier Suharto.

Perkembangan politik NU saat memasuki Orde Baru mulai menyurut. Hal tersebut dikarenakan saat NU berada di PPP, NU seperti dianaktirikan. Di dalam PPP yang banyak berperan penting adalah para modernis. Karier politik NU semakin tak jelas. Hingga pada akhirnya NU memilih ke khittah 1926, dengan artian, NU kembali pada tujuan pertama mereka membentuk organisasi NU untuk berdakwah di bidang sosial dan pendidikan, bukan terjun pada politik praktis.

### **Daftar Rujukan**

- Ali, M Rizwan Haji. 2007. *Strategi Politik Memenangkan Pilkada Secara Damai*, Rubrik. Opini: Centre For Electoral Reform (Cetro). 48 ObserVasiVoI. 6, No.1.
- Bisri, A. Musthafa. 2002. *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdur Rahman Wahid selama Era Lengser*. Yogyakarta: LkiS.
- Dian, Nimmo. 2000. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media, cetakan ke-4*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Effendi, Djohan. 2010. *Pembaruan tanpa membongkar tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Feillard, Andree. 1997. *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LkiS.
- Imam Hidayat. 2009. *Teori-teori Politik*. Malang: Setara Press.
- Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai; Konstruksi Sosial berbasis Agama*. Yogyakarta: LkiS.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2004. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*. Jakarta: LP3ES.
- Nafsiyah, Siti. 2000. *Profesor Hembung pemenang the Star of Asia Award*. Jakarta: Prestasi Insan Indonesia.
- O.U. Efendi. 1993. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

- Turmudi, Endang. 2004. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Wajidi, Farid. 1994. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS.
- W. Littlejohn, Stephen. 1998. *Theories of Human Communication*. USA: Wadsworth Publishing Company.
- Zada, Khamami, A. Fawaid Sjadzili. 2010. *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta.